

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, 2023, Halaman 236-245
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10251111)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10251111>

Tantangan Etika Dalam Globalisasi Ekonomi: Perspektif Keadilan Sosial

Juan Sibarani¹, Tri Kurnia², Bonaraja Purba³

^{1,2,3}Program Studi Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email: Sibaranijuan61@gmail.com¹, trik8342@gmail.com², bonarajapurba@gmail.com³

Abstrak

Etika dan nilai moral, mengarahkan orang dan masyarakat dalam mengendalikan perilaku mereka. Dengan kata lain, definisi ini juga dikenal sebagai seperangkat nilai yang memandu tindakan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Saat ini, ada banyak masalah etika yang perlu ditangani sehubungan dengan ekonomi global yang berkembang pesat. Tujuan penelitian ini ialah untuk Implementasi etika pada era globalisasi diperlukan, karena gaya hidup masyarakat di era global mengalami perubahan, terpaan komunikasi di era global membawa pengaruh sangat luas, Globalisasi dapat mengancam memudarnya sistem nilai masyarakat pada segala aspek kehidupan globalisasi ekonomi yang semakin berkembang memberikan akses ke pasar yang sangat besar bagi bisnis. Akibatnya, para pelaku pasar bersaing ketat untuk mengungguli satu sama lain. Proses globalisasi juga mengakibatkan kaburnya batas-batas bisnis antar negara karena ekonomi masing-masing negara berintegrasi ke dalam ekonomi dunia. Ketidaksetaraan ekonomi, baik di dalam maupun di antara negara-negara, semakin meningkat, dan hal ini menimbulkan pertanyaan etis di era globalisasi. Kesenjangan ekonomi yang semakin besar merupakan hasil dari globalisasi, dengan segelintir orang dan perusahaan multinasional yang meraup keuntungan besar dengan mengorbankan sebagian besar orang. Lingkungan sering kali terkena dampak negatif dari globalisasi ekonomi. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan multinasional sering mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan dampak lingkungan yang merugikan seperti penggundulan hutan, polusi udara dan air, serta perubahan iklim.

Kata kunci: *Etika ekonomi, perspektif keadilan social*

Abstract

Ethics and moral values, direct people and societies in controlling their behavior. In other words, this definition is also known as a set of values that guide human actions both as individuals and societies. Today, there are many ethical issues that need to be addressed in light of the rapidly growing global economy. The purpose of this study is to Implementation of ethics in the era of globalization is necessary, because the lifestyle of people in the global era has changed, the exposure to communication in the global era has a very broad influence, globalization can threaten the fading of the community value system in all aspects of life the growing globalization of the economy provides access to a very large market for businesses. As a result, market players compete fiercely to outperform each other. The process of globalization has also resulted in the blurring of business boundaries between countries as each country's economy integrates into the world economy. Economic inequality, both within and between countries, is increasing, and this raises ethical questions in the era of globalization. Growing economic inequality is a result of globalization, with a few people and multinational corporations reaping huge profits at the expense of the vast majority. The environment is often negatively impacted by economic globalization. To maximize profits, multinational corporations often exploit natural resources.

Keywords: *Economic ethics, social justice perspective*

Article Info

Received date: 10 November 2023

Revised date: 20 November 2023

Accepted date: 27 November 2023

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ekonomi yang terus berkembang, tantangan etika menjadi semakin kompleks, terutama dalam konteks keadilan sosial. Perubahan pesat dalam perdagangan internasional, teknologi, dan pergerakan modal telah mengubah struktur ekonomi secara mendasar. Amartya Sen, seorang ekonom dan filosof, telah mengembangkan konsep keadilan sosial yang menekankan pentingnya akses yang adil terhadap sumber daya dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dia berpendapat bahwa ketidaksetaraan ekonomi harus dikurangi untuk mencapai keadilan sosial. Pandangan ini menekankan perlunya memperbaiki kondisi hidup orang miskin dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Namun, meskipun globalisasi memberikan peluang pertumbuhan ekonomi yang signifikan, juga memunculkan sejumlah masalah etis yang mendalam. Salah satu masalah utama adalah ketidaksetaraan ekonomi yang terus memburuk, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pertanyaan tentang bagaimana menjaga keadilan sosial dalam era globalisasi menjadi semakin mendesak. Artikel ini akan mengeksplorasi beberapa tantangan etika yang muncul dalam konteks globalisasi ekonomi, dengan fokus pada isu-isu seperti ketidaksetaraan ekonomi, pekerjaan, upah, eksploitasi buruh, dampak lingkungan, akses sumber daya, dan keadilan internasional. Dengan pemahaman mendalam tentang permasalahan ini, kita dapat berupaya mencari solusi yang mendorong keadilan sosial dalam dinamika globalisasi ekonomi yang terus berubah.

Globalisasi ekonomi yang semakin berkembang memberikan akses ke pasar yang sangat besar bagi bisnis. Akibatnya, para pelaku pasar bersaing ketat untuk mengungguli satu sama lain. Fenomena globalisasi menyebabkan kaburnya batas-batas bisnis antar negara, karena ekonomi setiap negara menjadi lebih terintegrasi ke dalam ekonomi global yang lebih besar. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya persaingan dan pengalihan kekuasaan dari produsen ke konsumen. Dampak globalisasi terhadap strategi dan taktik bisnis sangat besar. Untuk meningkatkan penjualan, memangkas biaya, dan meningkatkan keuntungan, manajer kreatif perlu mencari cara untuk membangun perusahaan yang berbeda dan sukses dalam skala lokal, regional, dan dunia. Informasi sangat penting untuk membantu bisnis mendapatkan keunggulan kompetitif.

Karena banyaknya manfaat yang diberikan oleh e-marketing, banyak bisnis yang memilih untuk memasarkan produk dan layanan mereka melalui e-marketing. Manfaat ini meliputi jangkauan pasar yang luas, distribusi informasi produk yang efektif, dan akses informasi yang mudah bagi pelanggan. Internet menawarkan manfaat dan keuntungan tersendiri bagi para pelaku bisnis dan konsumen. Perkembangan e-commerce difasilitasi oleh media elektronik canggih yang dikenal dengan nama Internet, yang berkembang dengan cepat. Sebuah bisnis dapat dikategorikan sebagai pemasar global e-commerce jika bisnis tersebut membuat homepage dan menerima pesanan online. Selain itu, Internet menghadirkan prospek untuk interaksi pelanggan global, yang dapat dimanfaatkan oleh pemasar untuk menjalin ikatan yang langgeng dengan pelanggan mereka. Interaksi ini diharapkan dapat meningkatkan hasil pemasaran.

Tren fesyen sekarang mencakup item pakaian Muslim seperti hijab selain pakaian kasual. Meningkatnya popularitas hijab dan busana Muslim dalam beberapa tahun terakhir telah menciptakan peluang bisnis yang fantastis. Hijab kini menjadi komponen penting dari identitas dan selera mode banyak wanita selain berfungsi sebagai simbol keyakinan agama mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana perdagangan online, atau "e-commerce", memengaruhi platform media sosial dan bagaimana hal itu berkaitan dengan gagasan bauran pemasaran, yang menyatukan strategi pemasaran konvensional dan kontemporer. Hal ini akan menjadi landasan taktik pemasaran e-commerce. Jejaring sosial internet diantisipasi menjadi penting untuk melacak efektivitas kampanye pemasaran online serta penjualan dan pembelian online, terutama di sektor-sektor di mana penggunaan media

elektronik untuk tujuan pemasaran-seperti internet-menjadi semakin populer. Sejalan dengan evolusi ini, tren hijab menjadi lebih populer dan inklusif di antara berbagai demografi, termasuk orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Produk hijab yang kami jual memiliki ciri khas tersendiri dan mengusung merek eksklusif kami.

TINJAUAN PUSTAKA

Ketidaksetaraan Ekonomi

Salah satu isu etika yang muncul dalam era globalisasi ekonomi adalah meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi, baik di dalam maupun di antara negara. Globalisasi telah menciptakan kesenjangan sosial yang semakin besar, di mana sejumlah kecil individu dan perusahaan multinasional memperoleh keuntungan besar, sementara banyak orang lain terpinggirkan secara ekonomi. Ini mengancam prinsip keadilan sosial, di mana semua warga negara seharusnya memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi dan kesejahteraan. Di tingkat nasional, ketidaksetaraan terlihat dalam disparitas pendapatan antar berbagai kelompok masyarakat. Di banyak negara, kelas menengah dan bawah mengalami tekanan ekonomi yang meningkat, sementara keuntungan berpusat pada elite ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan perpecahan sosial dan ketegangan yang berpotensi mengancam stabilitas sosial dan politik. Di tingkat internasional, negara-negara dengan ekonomi yang lebih kuat memiliki lebih banyak akses ke pasar global dan mengambil manfaat dari perdagangan internasional, sementara negara-negara miskin sering kali terperangkap dalam kemiskinan struktural. Tantangan etis dalam konteks ini adalah bagaimana mengatasi ketidaksetaraan ekonomi antar negara dan memastikan bahwa globalisasi ekonomi memberikan manfaat yang merata kepada semua negara.

Pekerjaan dan Upah

Meskipun peluang pekerjaan baru muncul di sektor-sektor seperti teknologi informasi, banyak pekerjaan tradisional telah hilang akibat otomatisasi dan outsourcing. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian pekerjaan dan penurunan upah bagi pekerja yang terkena dampaknya. Globalisasi memiliki dampak kompleks terhadap pekerjaan dan upah di seluruh dunia. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang baru dengan meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan investasi asing, yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan individu. Namun, di sisi lain, persaingan yang meningkat dapat menempatkan tekanan pada perusahaan lokal untuk menjadi lebih efisien, yang kadang-kadang dapat mengakibatkan pemindahan pekerjaan ke negara-negara dengan upah lebih rendah. Selain itu, perkembangan teknologi yang terkait dengan globalisasi dapat menghasilkan otomatisasi pekerjaan, menggantikan pekerjaan manusia, terutama pekerjaan yang memerlukan keterampilan rendah. Oleh karena itu, negara-negara yang terlibat dalam globalisasi seringkali dihadapkan pada tugas yang rumit untuk mengelola dampaknya terhadap pekerjaan dan upah, termasuk mempertimbangkan kebijakan yang melindungi pekerja dan menjaga keseimbangan dalam pasar tenaga kerja. Tantangan etika dalam hal ini adalah bagaimana memastikan bahwa pekerja mendapatkan perlindungan yang memadai dan upah yang adil dalam ekonomi global yang berubah dengan cepat.

Eksplotasi Buruh

Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif, dan salah satu dampak negatifnya adalah eksploitasi terhadap buruh yang bekerja untuk perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional cenderung mencari keuntungan dengan memaksimalkan produksi dengan biaya rendah, yang dapat mengakibatkan pekerjaan yang tidak aman dan upah yang sangat rendah. Hal ini terutama terjadi dalam industri manufaktur di negara-negara berkembang, di mana pekerja seringkali bekerja dalam kondisi yang buruk. Tantangan etika dalam hal ini adalah memastikan bahwa hak-hak pekerja dihormati di seluruh rantai pasokan global, termasuk upah yang cukup, kondisi kerja yang aman, dan hak untuk bersindikat. Organisasi

internasional, pemerintah, dan perusahaan memiliki peran penting dalam memerangi eksploitasi buruh ini dan memastikan prinsip-prinsip keadilan sosial ditegakkan dalam produksi global.

Dampak Lingkungan

Globalisasi ekonomi seringkali berdampak negatif pada lingkungan. Perusahaan multinasional sering mencari keuntungan dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan dampak lingkungan yang merugikan, seperti deforestasi, polusi air dan udara, serta perubahan iklim. Tantangan etika dalam hal ini adalah bagaimana mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kita perlu mengembangkan kebijakan yang mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap planet kita. Ini adalah tanggung jawab bersama kita untuk menjaga bumi ini untuk generasi masa depan.

Akses ke Sumber Daya

Akses yang adil dan efisien ke sumber daya alam dan manusia merupakan faktor penting dalam pengembangan ekonomi suatu negara. Tantangan etika dalam hal ini adalah memastikan akses yang adil dan berkelanjutan terhadap sumber daya ini, dengan tujuan menciptakan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kualitas hidup. Ini mencakup masalah akses yang adil terhadap sumber daya alam, seperti tanah, air, hutan, mineral, dan sumber daya manusia, seperti tenaga kerja terampil dan pengetahuan. Dalam konteks globalisasi ekonomi, isu-isu akses yang adil terhadap sumber daya seperti air, pangan, dan obat-obatan menjadi penting, karena perusahaan besar sering memiliki kekuatan untuk mengendalikan sumber daya ini, sementara masyarakat miskin dan rentan sering kali terpinggirkan. Tantangan etika dalam hal ini adalah bagaimana memastikan bahwa sumber daya yang penting untuk kelangsungan hidup manusia diakses secara adil.

METODE

Untuk menyelidiki pemahaman atas pertanyaan penelitian yang diajukan, penelitian ini menggabungkan metodologi analisis kualitatif dan deskriptif. Dua metode utama-studi literatur dan observasi-digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk studi literatur, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber referensi yang relevan dan dapat diakses secara digital, seperti buku, artikel, dan undang-undang terkait. Sementara itu, interaksi dan berita sehari-hari menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan observasi terhadap sikap dan perilaku penyelenggara negara dan masyarakat umum. Setelah melakukan kajian pustaka dan melakukan observasi, data-data tersebut ditelaah relevansinya dengan cita-cita ideologi negara yang sedang diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak dapat untuk menghindari dari realitas globalisasi. Hubungan lintas batas dibentuk oleh globalisasi, dan lalu lintas menunjukkan betapa bergantungnya manusia satu sama lain dan bagaimana mereka saling membutuhkan dan meningkatkan satu sama lain. Di satu sisi, negara-negara dapat memetik manfaat dari pembangunan, yang telah memberikan dampak positif. Kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan sistem transportasi telah memudahkan negara untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai berbagai tugas yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan. Banyak isu yang diprioritaskan oleh pemerintah, baik nasional maupun lokal, yang dapat dilihat oleh masyarakat umum. Melalui media, masyarakat dapat dengan mudah mengamati dan mempelajari hal-hal yang menjadi program pemerintah dalam jangka panjang, menengah, dan pendek. Sebagai contoh, pejabat pemerintah pusat dapat dengan cepat dan mudah melakukan peninjauan ke daerah-daerah dengan bantuan fasilitas sistem transportasi. Memungkinkan untuk memverifikasi hal-hal

yang telah dilaporkan di lapangan. Sebagai contoh, pemerintah dapat dengan cepat mengirimkan lebih banyak pasukan keamanan dari satu daerah ke lokasi konflik ketika konflik muncul. Kemudahan yang sama dapat digunakan di tempat lain.

Implementasi Peran Etika Bagi Penyandang Profesi, Bisnis, dan Komunikasi Di Era Globalisasi

Implementasi Peran Etika Bagi Penyandang Profesi di Era Globalisasi

Orang-orang bertanggung jawab atas profesi mereka berdasarkan etika. Setiap orang yang menjalankan profesinya harus selalu melakukan pendekatan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya dengan penuh tanggung jawab. Di era global, para profesional diharapkan untuk bekerja sekeras mungkin untuk mencapai hasil yang unggul dan standar di atas rata-rata. Tentu saja, tanggung jawab yang mereka emban membebani kompetensi dan potensi profesional mereka. Mereka harus siap untuk bersaing dalam skala global di negara kita, baik di dalam profesinya sendiri maupun dengan profesi dari negara lain.

Para profesional dari negara Indonesia yang kalah dalam persaingan sering mengambil jalan pintas untuk menghalalkan segala cara untuk menang tanpa didasari oleh keterampilan dan keahlian yang dapat diandalkan dan sangat baik. Mereka percaya bahwa orang-orang dari negara lain lebih profesional dan semua pekerjaan yang dilakukan penuh dengan pertimbangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional pula. Dalam situasi seperti ini, orang mulai mengabaikan etika dan bahkan dengan sengaja melanggarnya. Akibatnya, masyarakat internasional memiliki kesan yang sangat negatif dan tidak dapat dipercaya terhadap para profesional dari negara kita.

Idenya adalah bahwa para profesional harus memperhatikan kaliber pengetahuan dan kemampuan yang mereka terapkan agar dapat bekerja secara kompeten dan menghasilkan karya yang berkualitas tinggi. Dengan kata lain, praktik profesional memerlukan hasil yang berkualitas tinggi. Atribut ini memiliki banyak aspek, khususnya: Di era global, para profesional harus kompeten dan berusaha menjadi sebaik mungkin dalam pekerjaan mereka. Selain itu, mereka harus secara konsisten meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang pekerjaan mereka. Para profesional harus bekerja dengan cara yang efektif dan efisien. Meskipun mereka tetap berusaha untuk selalu sempurna dan sesuai dengan bidang pekerjaan mereka, hasil kerja mereka setidaknya sesuai dengan harapan pengguna atau orang yang menggunakan jasa mereka. Jelaslah bahwa di era global, etika profesi memainkan peran penting dalam membatasi pelanggaran, yang memiliki probabilitas tinggi dalam periode globalisasi ini.

Etika membuat Penyandang Profesi di Era Global konsekuen Menerapkan Keadilan Prinsip keadilan

Persyaratan ini, yang berkaitan dengan praktik suatu profesi, menyatakan bahwa seorang profesional tidak boleh melanggar hak-hak individu, kelompok, organisasi, atau pemerintah. Justru sebaliknya, seorang profesional harus menghormati hak-hak orang lain dengan cara yang sama seperti ia mengharapkan orang lain menghormati hak-haknya sendiri dan hak-hak organisasi atau kelompok yang diwakilinya. Oleh karena itu, seorang profesional harus berhenti bertindak jika mereka mengetahui bahwa penggunaan posisi mereka akan melanggar hak-hak pihak ketiga. Dunia modern yang mengglobal ditandai dengan meningkatnya kompleksitas, keragaman, saling ketergantungan, dan saling membutuhkan dalam menangani satu tugas. Akibatnya, semua profesional harus mampu berkolaborasi dengan berbagai kelompok yang memiliki hubungan dengan organisasi mereka. Namun, banyak profesional yang menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Dia sering menggunakan posisinya dan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan secara tidak benar, bahkan untuk keuntungan pribadi. Jika suatu pihak menjalin

hubungan dengan atasannya dan mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, ia akan dianggap baik, dan pihak yang tidak mendapatkan perlakuan yang sama tidak akan diperlakukan secara adil. Tidak diragukan lagi, telah terjadi ketidakadilan dalam situasi ini, dan konsep ini meluas ke kantor-kantor pemerintah dan juga bisnis swasta. Berdasarkan fakta-fakta ini, jelaslah bahwa kemampuan seorang profesional untuk menegakkan keadilan telah difasilitasi oleh etika, terutama dalam hal membina hubungan dengan pihak-pihak yang akan berhubungan dengan bisnisnya.

Etika membuat Penyandang Profesi di Era Global

Karena seorang profesional memiliki kebebasan untuk menjalankan profesinya, maka prinsip otonomi berlaku untuk semua anggota profesi. Namun demikian, para profesional tetap memiliki kebebasan untuk menjalankan profesinya sesuai dengan keinginan mereka, termasuk mematuhi kode etik profesinya. Secara praktis, kode etik adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh semua anggota profesi dan berfungsi sebagai standar perilaku. Namun demikian, hal tersebut tetap dilaksanakan dan diwujudkan dalam suasana kebebasan bagi setiap anggota dalam tugas-tugas spesifik yang harus mereka selesaikan. Artinya, setiap anggota profesi bebas untuk memilih tindakan yang terbaik bagi dirinya sendiri dalam tugas dan situasi tertentu yang dihadapinya karena profesi memiliki kode etik profesi.

Etika membuat Penyandang Profesi Menghormati Hak Orang lain

Sebagai hasilnya, standar etika untuk para profesional didasarkan pada gagasan tanggung jawab dalam semua usaha, untuk mencegah kerusakan reputasi profesional yang timbul dari perilaku yang melanggar atau bahkan melanggar hak-hak orang lain. Jika sebuah profesi terhubung dengan lingkungan global, reputasi individu atau kelompok yang mempraktikkannya akan terkait dengan negara tempat mereka berada, yang akan berdampak pada persepsi yang dimiliki oleh negara lain terhadap negara tersebut.

Etika membuat Penyandang Profesi Mendahulukan Kepentingan Klien

Klien, atau Pengguna Akhir Untuk mempraktikkan profesinya, para profesional harus, secara teori, bersikap altruistik dan memprioritaskan kebutuhan klien, pelanggan, dan konsumen mereka. Para profesional diharuskan untuk mengerahkan seluruh pengetahuan dan pengalaman mereka untuk melayani kebutuhan klien mereka, tanpa mempertimbangkan keuntungan atau kerugian finansial mereka sendiri. Para profesional sering kali mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan klien, pelanggan, atau konsumen mereka. Para profesional harus dapat memahami pengetahuan pelanggan dalam konteks ini, bekerja dengan dasar pemikiran bahwa klien, konsumen, atau pelanggan di era global memiliki kepentingan yang sangat beragam dan dapat dipuaskan ketika menggunakan jasa mereka. Tentu saja, hal ini akan sangat kompetitif dan merupakan kesempatan yang fantastis untuk pertumbuhan profesional. Para ahli yang memiliki reputasi baik di bidang ini akan percaya bahwa ini adalah aset yang sangat berharga dalam situasi ini dan tidak boleh diabaikan, terutama jika hal tersebut merugikan klien, pelanggan, atau konsumen di luar negeri. Secara alami, masuk akal jika etika akhirnya memainkan peran dalam hubungan yang harus dijalin oleh para profesional dengan klien, pelanggan, konsumen, dan sebagainya.

1. Etika membuat Penyandang Profesi Melakukan suatu Pengabdian, kewajiban, dan Idealisme sebagai berikut:
 - a) Kode etik Passion adalah aturan atau peraturan yang diikuti dan diwajibkan untuk diikuti oleh para profesional untuk melindungi kepercayaan klien, pasien, pelanggan, dan konsumen. Terdapat kode etik dalam banyak profesi terhormat. Kode etik adalah seperangkat aturan yang harus diikuti oleh para praktisi profesional untuk mempraktikkan perdagangan mereka. Para profesional itu sendiri yang menetapkan

kode etik. Oleh karena itu, menjunjung tinggi standar profesi seseorang dalam segala situasi dituntut oleh etika profesi yang mulia.

- b) Kewajiban Seorang profesional harus benar-benar menyadari persyaratan etika yang berlaku untuk bidang pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang profesional yang menjunjung tinggi kode etik melakukannya karena ia benar-benar merasa bahwa persyaratan moral dari bidang pekerjaannya merupakan beban yang berat, dan ia berniat untuk tidak pernah menyimpang darinya. Hal ini bukan sekadar hobi atau sesuatu yang dilakukan oleh rekan-rekannya.
- c) Terakhir, harus jelas bahwa hanya seorang idealis yang mampu menjunjung tinggi standar moral dari sebuah profesi yang mulia. Idealisme dalam arti bahwa ia benar-benar dan tanpa pamrih ingin membantu orang lain dalam parameter bidang pekerjaannya. Individu yang hanya mementingkan diri sendiri, apalagi mereka yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak layak untuk menjalankan profesi yang mulia ini.

Implementasi Peran Etika dalam Bisnis Global

Elemen-elemen yang membuat peran etika dalam bisnis menjadi sangat penting harus diteliti, jika ingin menerapkan Prinsip-prinsip Etika dalam Bisnis secara global. Dalam hal etika dalam bisnis internasional, para profesional perlu mengikuti beberapa panduan, termasuk:

- 1) Prinsip Otonomi dalam Bisnis Internasional Sikap dan kemampuan para pelaku bisnis untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri atas apa yang mereka yakini benar adalah apa yang dimaksud dengan prinsip otonomi dalam bisnis, khususnya dalam bisnis global. Namun, kebebasan itu sendiri tidak menjamin bahwa orang dapat berperilaku secara moral dan mandiri. Tanggung jawab juga merupakan prasyarat untuk otonomi. Otonomi, yang mencakup kebebasan dan tanggung jawab, merupakan konsep yang paling mendasar dalam dunia bisnis global. Hal ini menjadi dasar bagi operasi bisnis, khususnya di era globalisasi.
- 2) Prinsip integritas dalam bisnis internasional. Penting bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia bisnis untuk memahami dan mengakui bahwa integritas dalam transaksi bisnis, khususnya dalam perdagangan internasional, merupakan prasyarat untuk operasi bisnis yang sukses, berjangka panjang, dan dikelola secara profesional. Seorang pengusaha harus memahami bahwa kejujuran dalam dunia bisnis dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti: a) menjunjung tinggi ketentuan kontrak dan perjanjian; b) menyediakan barang dan jasa berkualitas tinggi; dan c) bersikap jujur kepada karyawan mengenai keadaan di tempat kerja.
- 3) Prinsip Non-Penipuan dan Prinsip Berbuat Baik dalam Bisnis Internasional Pada kenyataannya, prinsip ini merupakan ajaran moral dari prinsip keadilan dalam perdagangan internasional. Para pelaku bisnis internasional harus menyadari bahwa keadilan adalah prinsip bisnis yang penting. Hal ini menyiratkan bahwa mereka yang berbisnis harus selalu memperlakukan orang lain dengan menghormati hak-hak mereka. Prinsip keadilan ini dimaksudkan untuk memandu tindakan kita agar hak-hak setiap orang ditegakkan secara setara dan sesuai dengan haknya tanpa merugikan satu sama lain. Pada intinya, tidak ada seorang pun yang ingin menerima perlakuan yang tidak adil. Semua orang menginginkan keadilan, tetapi keadilan harus diperoleh.
- 4) Nilai Menghargai Diri Sendiri Sebelum memperlakukan orang lain dengan hormat, para pebisnis harus dapat menghargai diri sendiri. Menerima perlakuan yang dapat meningkatkan harga diri seseorang di mata orang lain merupakan hal yang esensial bagi manusia, dan hal ini juga berlaku bagi harga diri organisasi bisnis di mata masyarakat global. Beberapa pertimbangan etis harus dilakukan ketika terlibat dalam

kegiatan komunikasi, baik itu dalam bentuk komunikasi individu, kelompok, massa, lintas budaya, maupun bisnis. Pertimbangan ini termasuk memahami atau mempelajari etika komunikasi, terutama di era global di mana berurusan dengan budaya, agama, bahasa, bangsa, dan lain-lain yang berbeda dapat menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan nyata yaitu :

- a) Tidak meremehkan individu, kelompok, atau negara lain.
- b) Tidak meremehkan individu, organisasi, atau negara lain.
- c) Menahan diri untuk tidak mengkritik individu, organisasi, atau negara lain karena hal ini dapat memicu perdebatan.
- d) Hindari berbohong atau menipu
- e) Menahan diri dari prasangka
- f) Bicaralah berdasarkan fakta. g. Menolak berdebat atas perbedaan pendapat yang kecil
- g) Menggunakan bahasa yang menyinggung individu, komunitas, atau negara lain
- h) Tidak mempertanyakan dan. Tidak melemparkan kesalahan ke tempat lain
- i) Tidak meragukan kejujuran orang yang diwawancarai
- j) Tidak meremehkan atau melecehkan individu, kelompok, atau negara lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, pusat perbelanjaan, kedai kopi, atau di mana pun, komunikasi selalu menempati posisi utama dalam segala aktivitas. Akibatnya, komunikasi berfungsi sebagai alat bagi individu, kelompok individu, dan anggota masyarakat untuk berinteraksi dan bahkan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tentu saja, dalam konteks ini, etika komunikasi mengacu pada standar, pedoman, dan prinsip-prinsip yang mengatur proses penyampaian informasi dalam segala situasi. Perlu disebutkan bahwa mengikuti aturan yang berlaku dalam segala situasi sangat penting bagi seorang individu, sekelompok individu, atau masyarakat untuk terlibat dalam komunikasi. Oleh karena itu, etika harus dimasukkan ke dalam kegiatan komunikasi untuk menghindari masalah ketika mencoba membangun hubungan dalam konteks lokal, nasional, atau bahkan internasional.

Dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, pusat perbelanjaan, kedai kopi, atau di mana pun, komunikasi selalu menempati posisi utama dalam segala aktivitas. Akibatnya, komunikasi berfungsi sebagai alat bagi individu, kelompok individu, dan anggota masyarakat untuk berinteraksi dan bahkan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tentu saja, dalam konteks ini, etika komunikasi mengacu pada standar, pedoman, dan prinsip-prinsip yang relevan dengan proses penyampaian informasi dalam segala situasi. Perlu disebutkan bahwa agar seorang individu, sekelompok individu, atau masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan komunikasi, mereka harus mematuhi aturan yang berlaku dalam segala situasi. Oleh karena itu, etika harus dimasukkan ke dalam kegiatan komunikasi untuk menghindari masalah ketika mencoba membangun hubungan dalam konteks skala kecil, nasional, atau bahkan internasional.

Implementasi Perspektif Keadilan Sosial

Sebagai hak konstitusional, keadilan sosial dijelaskan dalam beberapa pasal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain menguraikan kedudukan setiap warga negara yang sama di hadapan hukum dan pemerintah, Pasal 27 ayat (1) dan (2) juga membahas hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. UUD 1945 juga menjelaskan hak untuk hidup dalam Pasal 28 A, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dalam Pasal 28 C, ayat (1), dan 31 (ayat (1) sampai (4)). Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menjelaskan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan tempat tinggal. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menguraikan kewajiban negara, terutama pemerintah, untuk

memajukan, membela, dan melindungi hak asasi manusia. Tidak dapat disangkal bahwa keadilan sosial adalah tema dalam karya-karya ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila kelima Pancasila. Hal ini menyiratkan bahwa tidak boleh ada eksploitasi manusia, bahwa keadilan sosial harus diterapkan secara merata, dan bahwa diskriminasi tidak boleh terjadi.

Komponen yang paling penting dari keadilan sosial adalah hak asasi manusia karena tanpa hak asasi manusia, gerakan menuju keadilan sosial akan tersendat-sendat. Nondiskriminasi dan kesetaraan adalah prasyarat untuk mewujudkan keadilan sosial. Tidak seorang pun dapat didiskriminasi dalam pelaksanaan hak-hak sipil dan politik mereka, menurut Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (UU No. 12/2005). Demikian pula, diskriminasi dalam penerapan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob)/Resolusi PBB No. 12/2005 secara khusus dilarang oleh Pasal 2 ayat (2) EkosobKonvensi Wina 1993 menekankan pada sifat hak-hak sipil dan ekosob yang tak terpisahkan dan saling bergantung. Agar hak-hak ekosob dapat terpenuhi, sumber daya harus didistribusikan secara adil, dan tidak boleh ada diskriminasi serta perlakuan yang sama terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan ketika mereka mengakses sumber daya tersebut. Landasan keadilan sosial adalah distribusi sumber daya yang adil. Ungkapan "Keadilan Sosial Dengan Non-Diskriminasi & Kesetaraan" dan "Tidak Ada Distribusi Sumber Daya yang Adil Tidak Ada Keadilan Sosial" digunakan.

Seperti yang telah disebutkan dalam penjelasan definisi keadilan sosial di atas, ada beberapa komponen penting yang menjadi indikator keadilan sosial, antara lain:

1. Distribusi sumber daya yang adil - ekonomi, sosial, hukum, dan lainnya - serta potensi masyarakat yang terpinggirkan dan kurang mampu untuk mendapatkan manfaat dari tindakan afirmatif, atau diskriminasi positif, dalam mengejar keadilan sosial.
2. Keadilan sosial memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan;
3. Pelaksanaan keadilan sosial didasarkan pada kesetaraan dan nondiskriminasi;
4. Keadilan sosial merupakan hak asasi dan hak konstitusional.

Pendidikan hukum dan keadilan sosial saling berkaitan. Salah satu cara untuk mempraktikkan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah melalui pengabdian kepada masyarakat. Pengejaran keadilan sosial dapat mengambil manfaat dari pendidikan hukum, khususnya di Fakultas Hukum. Tidak hanya pendidikan hukum dari sudut pandang keadilan sosial, tetapi juga, secara lebih spesifik, bagaimana unit-unit kegiatan fakultas hukum yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk memajukan keadilan sosial. Berdasarkan penelitian dari Ford Foundation, ditemukan bahwa klinik hukum bermanfaat bagi hak asasi manusia, keterlibatan masyarakat, akuntabilitas pemerintah, dan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di negara-negara berkembang.

SIMPULAN

Etika berfungsi sebagai panduan bagi usaha manusia, mengajarkan manusia bagaimana hidup dan berperilaku dengan cara-cara yang dapat membantu individu, komunitas, atau masyarakat secara keseluruhan untuk menemukan arah mereka. Penerapan etika di era globalisasi menjadi sangat penting karena globalisasi dapat mengancam luntarnya sistem nilai masyarakat di segala bidang kehidupan, gaya hidup masyarakat yang berubah, dan paparan komunikasi yang berdampak luas. Keadilan distributif dan komutatif ada; keadilan distributif memberikan penekanan khusus pada alokasi keadilan menurut jasa. Sebaliknya, keadilan komutatif memandang keadilan dalam hal kesetaraan yang diterima setiap orang, tanpa memandang prestasi. Dalam hal keadilan yang didasarkan pada kesetaraan tanpa memandang prestasi atau bahkan kedudukan sosial, ekonomi, atau politik, keadilan sosial lebih mirip dengan keadilan komutatif.

Referensi

- Agus, A. A. 2015. Relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi. *Jurnal Office*, 2(2) 229-238, vol.5, no. 3.
- Keraf, A. Sony, 1993 *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta, Kanisius.
- Juneman, Meinarno, E. A., & Rahardjo, W. (2012). *Tantangan Etika Dalam Globalisasi Ekonomi*, vol 3, no. 4.
- Suyanto. 2014. *Etika Ekonomi*
- Ginting. 2015. *Etika Ekonomi di Era Globalisasi*.*Jurnal Ilmiah*.vol 2 no.1
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.